



TINGKAT DAYA LAYAN PRASARANA BERDASARKAN PERKEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2006-2016

Melda Latifah Hanum¹, Fitriana Syahar²

Program Studi Geografi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: Meldalatifahhanum@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur variasi keruangan tingkat ketersediaan prasarana sertadaya layanan prasarana berdasarkan perkembangan wilayah di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Pasaman. Populasi ini sekaligus sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumenter. Untuk mengukur tingkat ketersediaan prasarana dan tingkat daya layanan prasarana menggunakan analisis skalogram terbobot. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 1) variasi keruangan tingkat ketersediaan prasarana di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Dua Koto. 2) variasi keruangan tingkat daya layanan prasarana di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 mengalami perubahan. Tahun 2006, yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Padang Gelugur, dan Kecamatan Mapat Tunggul. Sedangkan tahun 2016 yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Mapat Tunggul, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Kata Kunci : Perkembangan Wilayah, Tingkat Ketersediaan, Tingkat Daya Layanan, Pertumbuhan Penduduk.

ABSTRACT

This study aims to measure variations in the level of availability of facilities and infrastructure as well as service capacity of facilities and infrastructure based on regional development in Pasaman Regency in 2006-2016. The population in this study were all districts in Pasaman Regency. This population as well as a sample. The data used are secondary data obtained from several agencies such as the Central Statistics Agency and the Pasaman Regency Public Works Agency. Data collection techniques used are documentary study techniques. To measure the level of availability of facilities and infrastructure and the level of service capacity of facilities and infrastructure using a weighted scalogram analysis. Based on the results of the study, it is known that 1) spatial variations in the level of availability of facilities and infrastructure in Pasaman Regency in 2006-2016 included in the high classification are in Lubuk Sikaping and Dua Koto Districts. 2) the variation in spatial level of service capacity of facilities and infrastructure in Pasaman Regency in 2006-2016 has changed. In 2006, included in the high classification were in Simpang Alahan Mati Subdistrict, Lubuk Sikaping Subdistrict, Padang Gelugur Subdistrict, and Mapat Tunggul Subdistrict. While in 2016 included in the high classification are in Simpang Alahan Mati District, Padang Gelugur District, Mapat Tunggul District, and Mapat Tunggul Selatan District.

Keywords: Regional Development, Availability Level, Service Level, Population Growth.

¹Mahasiswa Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial

²Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang dengan Pembimbing Fitriana Syahar, S.Si, M.Si

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan tuntutan bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena penduduk makin bertambah besar jumlahnya, maka kebutuhannya pun bertambah jumlahnya, jenisnya, dan kualitasnya, seiring dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Salah satu tujuan pokok pembangunan daerah adalah mengembangkan pembangunan wilayah-wilayah yang ada di dalamnya terutama dalam hal perkembangan antar wilayah di daerah tersebut (Adisasmita, 2010).

Demikian juga dengan pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi sebagai salah satu faktor dalam pembangunan, dimana dengan adanya kelengkapan fasilitas pelayanan maka suatu daerah dapat dikatakan berkembang sehingga dalam hal ini fasilitas pelayanan sosial ekonomi merupakan fasilitas yang menjadi kebutuhan penduduk pada suatu wilayah dan dapat mendukung perkembangan wilayah. Menurut Parr (1999), perkembangan wilayah senantiasa disertai dengan perubahan struktural. Perkembangan/pertumbuhan suatu wilayah merupakan suatu proses kontinyu sebagai hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah.

Dalam mengatasi masalah yang terjadi, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas sosial ekonomi untuk kepentingan umum

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan pembangunan wilayah/kota. Kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berdampak kepada diberikannya kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Implementasi dari kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengembangkan potensi daerah dengan menyediakan fasilitas wilayah/kota.

Keadaan tersebut tidak terlepas dari pertambahan penduduk di Kabupaten Pasaman yang terus meningkat, Ini ditunjukkan penduduk di Kabupaten Pasaman mengalami peningkatan sebesar 16.744 jiwa, pada tahun 2006 berjumlah 256.060 jiwa, tahun 2016 bertambah menjadi 272.804 jiwa. Sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, harus pula diikuti dengan distribusi fasilitas pelayanan sarana dan prasarana yang merata sesuai dengan kebutuhan penduduknya.

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Pasaman pada tahun 2006 adalah 364 unit menjadi 399 unit pada tahun 2016 yang terdiri dari pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA, namun jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Pasaman belum dapat terlayani dengan baik. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, Taman Kanak-Kanak (TK) memiliki standar 1 fasilitas TK untuk melayani

1.250 penduduk. Fasilitas SD, setiap terdapat 1.600 penduduk maka minimal didirikan 1 SD. Untuk tingkat SMP, minimal terdapat 1 fasilitas apabila untuk 4.800 penduduk. Sedangkan untuk tingkat SMA, setiap terdapat 4.800 penduduk maka minimal didirikan 1 fasilitas pendidikan setingkat SMA sederajat. Sarana pendidikan sudah tersebar di masing-masing Kecamatan Kabupaten Pasaman, namun terdapat beberapa wilayah yang belum dapat terlayani. Sarana kesehatan pada tahun 2006 adalah 80 unit menjadi 112 unit pada tahun 2016 yang terdiri dari RS, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik bersalin, apotek, dan toko obat. Berdasarkan standar yang ada (SNI 03-1733-2004), keberadaan 1 fasilitas rumah sakit dapat melayani sekurang-kurangnya 240.000 penduduk, fasilitas rumah sakit yang tersedia di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 ada 2 unit yang terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Panti dan jumlah penduduk keseluruhan Kabupaten Pasaman 256.060 jiwa tahun 2006 meningkat menjadi 272.806 jiwa tahun 2016, artinya pelayanan fasilitas kesehatan rumah sakit sejak tahun 2006 hingga tahun 2016 sudah terlayani, karena berdasarkan SPM yang telah ditentukan adalah satu fasilitas harus dapat melayani 240.000 penduduk. Jumlah fasilitas puskesmas di Kabupaten Pasaman tahun 2006 adalah 10 unit yang tersebar di beberapa Kecamatan dan tahun 2016 menjadi 16 unit yang tersebar di semua

Kecamatan. Fasilitas puskesmas harus ada apabila terdapat 120.000 penduduk di sekitar daerah tersebut. Jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Pasaman tahun 2006 adalah 38 unit meningkat menjadi 50 unit yang tersedia di tiap Kecamatan. Sebuah fasilitas puskesmas pembantu harus tersedia apabila sudah terdapat 30.000 penduduk, fasilitas klinik bersalin hanya terdapat satu Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikaping tahun 2006 dan pada tahun 2016 terdapat dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Padang Gelugur, untuk fasilitas klinik bersalin minimal terdapat 1 fasilitas apabila untuk 30.000 penduduk, sedangkan fasilitas apotek dan toko obat juga merupakan fasilitas yang penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan minimal terdapat 1 fasilitas untuk 30.000 penduduk. Sedangkan jumlah sarana ekonomi seperti pasar, toko/kios, dan koperasi tahun 2006 adalah 658 unit dan bertambah menjadi 792 unit tahun 2016. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 yang ditetapkan, bahwa 30.000 penduduk untuk 1 fasilitas pasar dan koperasi. Sedangkan untuk fasilitas toko/kios, ditetapkan bahwa 2.500 penduduk untuk 1 fasilitas toko/kios. Ketersediaan prasarana ekonomi sudah tersebar di tiap-tiap Kecamatan Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa tingkat pelayanan prasarana di Kabupaten Pasaman belum memadai. Disamping itu,

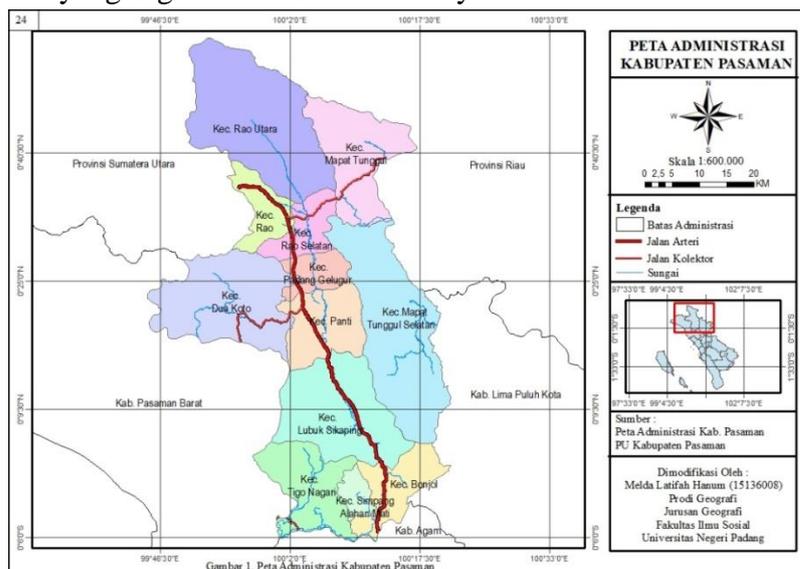
pembangunan prasarana Kabupaten Pasaman difokuskan pada wilayah yang maju saja. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap tingkat pelayanan prasarana di Kabupaten Pasaman, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya yang bisa dipastikan akan terus menerus meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasaman. Populasi ini sekaligus sebagai sampel. Data yang digunakan adalah

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “Tingkat Daya Layan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016”.

data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumenter.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Pasaman

Proses selanjutnya setelah pengumpulan data yaitu analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dimana menurut Sugiono (2005:21) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk

membuat kesimpulan yang lebih luas. Untuk mengukur tingkat ketersediaan prasarana serta daya layan prasarana menggunakan analisis skalogram terbobot.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis skalogram (Muta'ali, 2015) sebagai berikut :

- 1) Membuat tabel skalogram pada Microsoft Excel yang terdiri dari kolom Kecamatan dan jumlah ketersediaan prasarana yang terdiri dari prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- 2) Mengalikan bobot dengan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Bobot merupakan kriteria minimum untuk mendapatkan hasil penilaian pada masing-masing unit fasilitas. Semakin tinggi fungsi pelayanan fasilitas, maka bobotnya semakin besar. Penentuan bobot pada setiap fasilitas adalah sebagai berikut: pendidikan (TK=1, SD=2, SMP=3, SMA=4), kesehatan (RS=6, puskesmas=5, pustu=4, klinik bersalin=3, apotik=2, toko obat=1), dan ekonomi yang terdiri dari pemasaran (pasar=2 dan toko/kios=1), lembaga keuangan (bank=3, koperasi KUD=1 dan koperasi Non KUD=2).
- 3) Menjumlahkan masing-masing jenis prasarana dan bobot prasarana untuk mendapatkan total jenis prasarana dan total bobot prasarana.
- 4) Menentukan indek sentralitas dengan cara nilai total bobot masing-masing prasarana dibagi dengan total keseluruhan bobot prasarana kemudian dikalikan dengan 100. Indek ini disebut indek sentralitas Marshall sebagai penemu awal.
- 5) Buat kembali tabel seperti tahap pertama yang terdiri dari kolom total jenis prasarana dan total bobot prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- 6) Menjumlahkan masing-masing total jenis prasarana dan total bobot prasarana untuk mendapatkan total keseluruhan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada tiap-tiap Kecamatan.
- 7) Menentukan indek sentralitas seperti pada tahap keempat dengan cara nilai total bobot masing-masing prasarana dibagi dengan total keseluruhan bobot prasarana kemudian dikalikan dengan 100.
- 8) Untuk mengukur tingkat daya layan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi maka ditentukan rasio total bobot dengan cara total bobot prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dibagi dengan jumlah penduduk setiap kecamatan kemudian dikalikan dengan 100.
- 9) Melakukan penskalaan (*scalling*) dengan rumus (Muta'ali,2015) :

$$S = (R-R_r)/(R_t-R_r) \times 100$$
 Dimana :
 S = Nilai skala
 R = Data mentah dari pengamatan yang diskalakan (total bobot prasarana)
 R_t = Data tertinggi dari pengamatan (nilai tertinggi dari total bobot prasarana)

R_r = Data terendah dari pengamatan (nilai terendah dari total bobot prasarana)

- 10) Langkah terakhir yaitu melakukan pengklasifikasian dengan perhitungan menggunakan metode standar deviasi. Penentuan interval dalam kelas dengan mempertimbangkan nilai

simpangan data terhadap rata-rata (r) atau standar deviasi (sd). Diperoleh rumus sebagai berikut (Muta'ali 2015) :

$$\begin{aligned} >r+sd/2 &= \text{Tinggi} \\ (r+sd)-(<r-sd) &= \text{Sedang} \\ <r-sd/2 &= \text{Rendah} \end{aligned}$$

Keterangan :

r = Rata-rata

sd = Standar Deviasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Ketersediaan Prasarana Ditinjau dari Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi di Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016

Dalam analisis pelayanan fasilitas bahwa untuk analisis ini sangat tergantung pada ketersediaan data. Semakin tinggi variasi fasilitas yang ada semakin valid hasil analisis fasilitas pelayanan, sesuai dengan pernyataan bahwa suatu wilayah yang mencirikan perkotaan apabila memiliki lebih dari delapan fasilitas umum (BPS 2008).

Tingkat ketersediaan prasarana di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 dihitung secara matematis menggunakan metode analisis skalogram terbobot. Aspek

fasilitas yang diperhitungkan untuk menentukan tingkat ketersediaan pelayanan menyangkut prasarana yang ada pada tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Pasaman pada tahun 2006 dan tahun 2016 diantaranya; (1) prasarana pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA), (2) prasarana kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, toko obat, RS, klinik bersalin, dan apotik), dan (3) prasarana ekonomi yang terdiri dari pemasaran (pasar dan toko/kios), lembaga keuangan (bank, koperasi KUD, dan koperasi non KUD).

Berikut adalah hasil perhitungan tingkat ketersediaan prasarana di masing-masing Kecamatan Kabupaten Pasaman tahun 2006.

Tabel 1. Tingkat Ketersediaan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2006

No.	Kecamatan	Tahun 2006										
		Pendidikan		Kesehatan		Ekonomi		TTF	TTB	I_S	Scalling	Klasifikasi
		T_F	T_B	T_F	T_B	T_F	T_B					
1	Tigo Nagari	29	58	7	23	41	60	77	141	7,26	29,41	Sedang
2	Bonjol	41	90	6	16	84	100	131	206	10,61	48,53	Sedang
3	Simpang Alahan Mati	13	25	4	13	51	60	68	98	5,05	16,76	Rendah

No.	Kecamatan	Tahun 2006										
		Pendidikan		Kesehatan		Ekonomi		TTF	TTB	I_S	Scalling	Klasifikasi
		T_F	T_B	T_F	T_B	T_F	T_B					
4	Lubuk Sikaping	56	116	22	58	139	207	217	381	19,63	100,00	Tinggi
5	Dua Koto	49	102	7	29	77	97	133	228	11,75	55,00	Tinggi
6	Panti	39	84	8	29	65	94	112	207	10,66	48,82	Sedang
7	Padang Gelugur	31	73	10	26	89	101	130	200	10,30	46,76	Sedang
8	Rao	30	69	4	11	60	87	94	167	8,60	37,06	Sedang
9	Rao Utara	24	49	2	8	10	20	36	77	3,97	10,59	Rendah
10	Rao Selatan	27	59	5	18	32	45	64	122	6,29	23,82	Sedang
11	Mapat Tunggul	16	33	3	13	14	27	33	73	3,76	9,41	Rendah
12	Mapat Tunggul Selatan	9	19	2	8	7	14	18	41	2,11	0,00	Rendah
TOTAL		364	777	80	252	669	912	1113	1971	1941	100	

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan sarana prasarana pada tahun 2006 yang termasuk dalam klasifikasi tinggi terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Dua Koto. Kecamatan Lubuk Sikaping mendapat total prasarana paling tinggi yaitu 217 prasarana yang terdiri dari prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, kemudian diikuti oleh Kecamatan Dua Koto dengan total prasarana yaitu 133 prasarana. Tingkat ketersediaan sarana dan prasaran yang termasuk dalam klasifikasi sedang berada di Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, dan

Kecamatan Rao Selatan. Sedangkan Kecamatan yang memiliki tingkat ketersediaan sarana prasarana yang rendah terdapat empat Kecamatan yakni Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Mapat Tunggul, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, dimana Kecamatan yang memiliki total prasarana yang paling rendah berada di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan yaitu 18 prasarana yang terdiri dari prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berikut adalah hasil perhitungan tingkat ketersediaan prasarana di masing-masing Kecamatan Kabupaten Pasaman tahun 2016.

Tabel 2. Tingkat Ketersediaan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2016

No	Kecamatan	Tahun 2016										
		Pendidikan		Kesehatan		Ekonomi		TTF	TTB	I_C	Scalling	Klasifikasi
		T_F	T_B	T_F	T_B	T_F	T_B					
	Tigo											
1	Nagari	28	60	9	31	57	82	94	173	7,47	24,44	Sedang
2	Bonjol	44	95	7	21	92	113	142	229	9,89	42,44	Sedang
	Simpang											
	Alahan											
3	Mati	16	34	6	22	57	69	79	125	5,40	9,00	Rendah
	Lubuk											
4	Sikaping	56	117	28	71	147	220	231	408	17,62	100,00	Tinggi
5	Dua Koto	51	108	9	35	88	120	148	263	11,36	53,38	Tinggi
6	Panti	37	79	12	38	74	110	123	227	9,80	41,80	Sedang
	Padang											
7	Gelugur	40	86	9	24	96	114	145	224	9,67	40,84	Sedang
8	Rao	32	70	9	22	73	103	114	195	8,42	31,51	Sedang
9	Rao Utara	21	46	4	14	25	39	50	99	4,27	0,64	Rendah
	Rao											
10	Selatan	33	73	8	28	39	61	80	162	6,99	20,90	Sedang
	Mapat											
11	Tunggul	21	47	6	25	25	42	52	114	4,92	5,47	Rendah
	Mapat											
	Tunggul											
12	Selatan	20	44	5	21	20	32	45	97	4,19	0,00	Rendah
	TOTAL	399	859	112	352	792	1105	1303	2316	100		

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan prasarana pada tahun 2016 yang termasuk dalam klasifikasi tinggi terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Dua Koto. Kecamatan Lubuk Sikaping mendapat total prasarana paling tinggi pada tahun 2016 yakni 231 prasarana yang terdiri dari prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, kemudian diikuti oleh Kecamatan Dua Koto dengan total prasarana yaitu 148 prasarana. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang termasuk dalam klasifikasi sedang berada di Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan

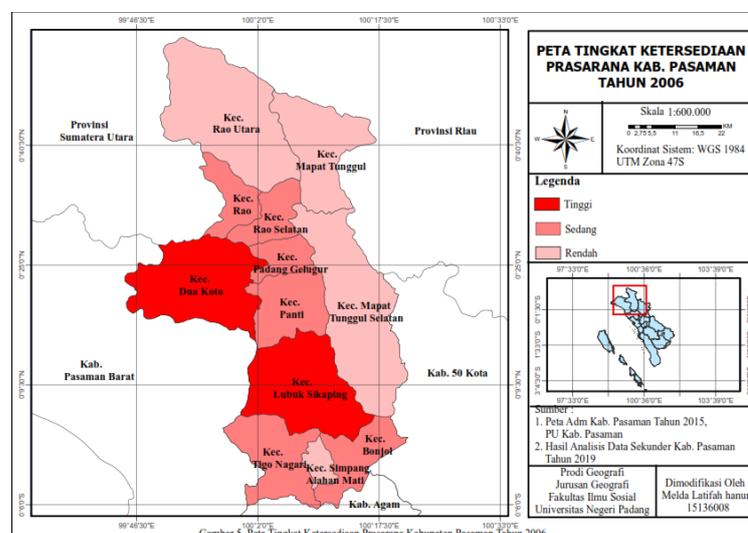
Bonjol, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, dan Kecamatan Rao Selatan. Sedangkan Kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi rendah terdapat empat Kecamatan yakni Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Mapat Tunggul, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, dimana Kecamatan yang memiliki total prasarana yang paling rendah berada di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan yaitu 45 prasarana yang terdiri dari prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dari hasil analisis data untuk tahun 2006, variasi keruangan dari

tingkat ketersediaan sarana dan prasarana ditinjau dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Kabupaten Pasaman cukup bervariasi. Dari 12 kecamatan yang ada, yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Dua Koto. Kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi sedang terdapat 6 kecamatan yaitu Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, dan Kecamatan Rao Selatan. Dan untuk kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi rendah berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Mapat Tunggul, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Sedangkan tahun 2016, variasi keruangan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Pasaman yang termasuk klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah tetap berada pada masing-masing kecamatan

yakni klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Dua Koto, klasifikasi sedang berada di Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, dan Kecamatan Rao Selatan, dan klasifikasi rendah berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Mapat Tunggul, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Dalam analisis pusat pelayanan fasilitas bahwa untuk analisis ini sangat tergantung pada ketersediaan data. Semakin tinggi variasi fasilitas yang ada semakin valid hasil analisis fasilitas pelayanan, sesuai dengan pernyataan bahwa suatu wilayah yang mencirikan perkotaan apabila memiliki lebih dari delapan fasilitas umum (BPS 2008).

Berikut menunjukkan hasil peta tingkat ketersediaan prasarana Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016.



Gambar 5. Peta Tingkat Ketersediaan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2006

Tahun 2006													
No	Kecamatan	Pendidikan		Kesehatan		Ekonomi		TTF	TTB	Jumlah Penduduk	Rasio Total Bobot	Scalling	Klasifikasi
		T _F	T _B	T _F	T _B	T _F	T _B						
1	Tigo Nagari	29	58	7	23	40	62	76	3	23.113	0,62	15,20	Rendah
2	Bonjol	41	90	6	16	83	2	0	8	25.277	0,82	56,53	Sedang
3	Simpan Alahan Mati	13	25	4	13	51	64	68	2	9.830	1,04	100,00	Tinggi
4	Lubuk Sikaping	56	11	22	58	6	7	4	1	43.858	0,87	65,81	Tinggi
5	Dua Koto	49	10	2	7	29	77	5	3	27.727	0,85	62,25	Sedang
6	Panti	39	84	8	29	63	95	0	8	33.175	0,63	16,87	Rendah
7	Padang Gelugur	31	73	10	26	87	99	12	8	21.524	0,92	76,17	Tinggi
8	Rao	30	69	4	11	58	85	92	5	22.792	0,72	36,50	Sedang
9	Rao Utara	24	49	2	8	10	23	36	80	10.020	0,80	51,57	Sedang
10	Rao Selatan	27	59	5	18	32	50	64	7	23.362	0,54	0,00	Rendah
11	Mapat Tunggul	16	33	3	13	14	31	33	77	8.336	0,92	76,94	Tinggi
12	Mapat Tunggul Selatan	9	19	2	8	7	19	18	46	7.046	0,65	22,11	Rendah
TOTAL		364	777	25	65	94	2	11	19	256060	9,39		

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan yang memiliki tingkat daya layan sarana prasarana pada tahun 2006 di Kabupaten Pasaman yang termasuk dalam klasifikasi

tinggi terdapat di empat Kecamatan yakni Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Padang Gelugur, dan Kecamatan Mapat Tunggul.

Kecamatan yang mendapat rasio paling tinggi berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati sebesar 1,04 diikuti oleh Kecamatan Padang Gelugur dan Kecamatan Mapat Tunggul dengan nilai sebesar rasio 0,92. kemudian Kecamatan Lubuk Sikaping mendapat nilai rasio sebesar 0,87. Yang termasuk dalam klasifikasi sedang berada di Kecamatan Bonjol, Kecamatan Dua Koto, Kecamatan Rao, dan Kecamatan Rao Utara. Sedangkan Kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi rendah yaitu Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Panti,

Kecamatan Rao Selatan, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Nilai rasio paling rendah terdapat di Kecamatan Rao Selatan sebesar 0,54 diikuti oleh Kecamatan Tigo Nagari sebesar 0,62. Kecamatan panti mendapat nilai rasio sebesar 0,63, kemudian Kecamatan Mapat Tunggul Selatan mendapat nilai rasio sebesar 0,65.

Berikut adalah hasil perhitungan untuk tingkat daya layan (*Function of Availability*) sarana dan prasarana di Kabupaten Pasaman tahun 2016.

Tabel 4. Tingkat Daya Layan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2016

No	Kecamatan	Tahun 2016											Klasifikasi
		Pendidikan		Kesehatan		Ekonomi		TTF	TTB	Jumlah Penduduk	Rasio Total Bobot	Scalling	
		T_F	T_B	T_F	T_B	T_F	T_B						
1	Tigo Nagari	28	60	9	31	57	82	94	173	25.701	0,67	12,33	Rendah
2	Bonjol	44	95	7	21	91	113	142	229	26.326	0,87	43,74	Sedang
3	Simpang Alahan Mati	16	34	6	22	57	69	79	125	11.634	1,07	76,40	Tinggi
4	Lubuk Sikaping	56	117	28	71	147	220	231	408	45.260	0,90	48,79	Sedang
5	Dua Koto	51	108	9	35	88	120	148	263	26.599	0,99	62,72	Sedang
6	Panti	37	79	12	38	74	110	123	227	38.095	0,60	0,00	Rendah
7	Padang Gelugur	40	86	9	24	96	114	145	224	23.469	0,95	57,25	Tinggi
8	Rao	32	70	9	22	73	103	114	195	23.753	0,82	35,93	Sedang
9	Rao Utara	21	46	4	14	25	39	50	99	10.628	0,93	53,58	Sedang
10	Rao Selatan	33	73	8	28	39	61	80	162	22.648	0,72	19,06	Rendah
11	Mapat Tunggul	21	47	6	25	25	42	52	114	9.327	1,22	100,00	Tinggi
12	Mapat Tunggul Selatan	20	44	5	21	20	32	45	97	9.366	1,04	70,21	Tinggi
TOTAL		399	859	112	352	792	1105	1303	2316	272806	10,78		

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan yang memiliki tingkat daya layan sarana prasarana pada tahun 2016 di Kabupaten Pasaman yang termasuk dalam klasifikasi tinggi terdapat di empat Kecamatan yakni Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Dua Koto, Kecamatan Mapat Tunggul, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Kecamatan yang mendapat rasio paling tinggi berada di Kecamatan Mapat Tunggul sebesar 1,22 diikuti oleh Kecamatan Simpang Alahan Mati sebesar 1,07, kemudian Kecamatan Mapat Tunggul Selatan mendapat nilai rasio sebesar 1,04, sedangkan nilai rasio Kecamatan Dua Koto sebesar 0,99. Yang termasuk dalam klasifikasi sedang berada di Kecamatan Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, dan Kecamatan Rao Utara. Sedangkan daya layan yang rendah berada di Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Panti, dan Kecamatan Rao Selatan. Nilai rasio paling rendah terdapat di Kecamatan Panti yaitu sebesar 0,60.

Hasil analisis data tahun 2006 untuk variasi keruangan dari tingkat daya layan sarana dan prasarana di Kabupaten Pasaman yang termasuk dalam klasifikasi tinggi terdapat 4 kecamatan yakni Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Padang Gelugur, dan Kecamatan Mapat

Tunggul. Kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi sedang berada di Kecamatan Bonjol, Kecamatan Dua Koto, Kecamatan Rao, dan Kecamatan Rao Utara. Dan kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi rendah berada di Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Panti, Kecamatan Rao Selatan, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Sedangkan tahun 2016, variasi keruangan tingkat daya layan sarana dan prasarana di Kabupaten Pasaman mengalami perubahan yakni Kecamatan Mapat Tunggul Selatan berubah menjadi klasifikasi tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping berubah menjadi klasifikasi sedang. Terjadinya perubahan tingkat daya layan pada kedua kecamatan tersebut adalah tidak seimbangny jumlah fasilitas yang tersedia dengan jumlah penduduk yang terdapat pada wilayah tersebut. Sedangkan kecamatan yang tetap dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Padang Gelugur, dan Kecamatan Mapat Tunggul. Klasifikasi sedang tetap berada di Kecamatan Bonjol, Kecamatan Dua Koto, Kecamatan Rao, dan Kecamatan Rao Utara. Untuk klasifikasi rendah tetap berada di Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Panti, dan Kecamatan Rao Selatan. Perubahan variasi keruangan tingkat daya layan sarana dan prasarana di Kabupaten Pasaman

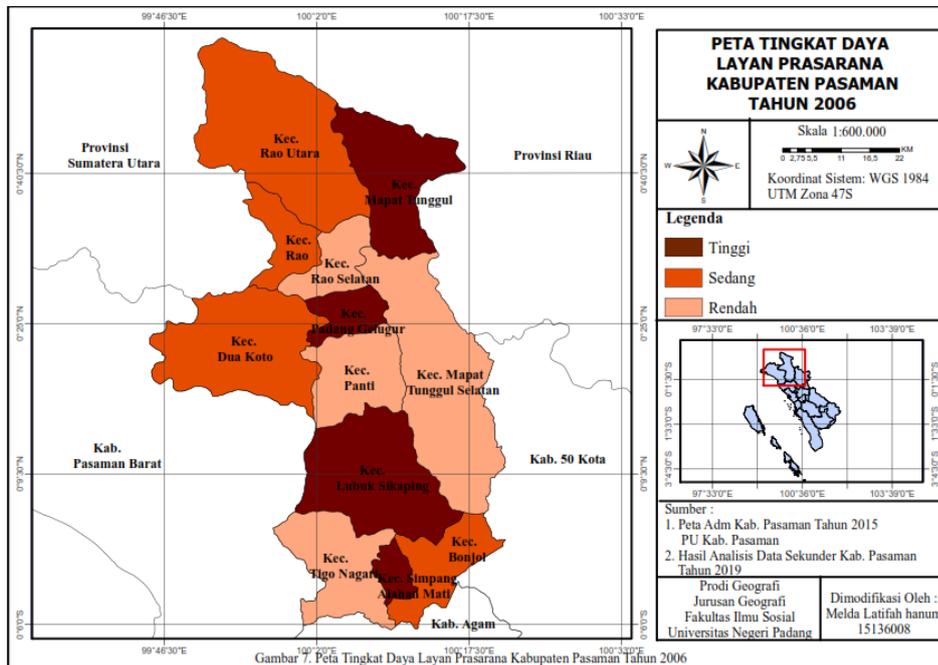
tahun 2006-2016 dikarenakan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diseimbangi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini juga dikuatkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Junianto (2014) mengatakan bahwa penambahan penduduk menuntut adanya penambahan fasilitas, jika penambahan penduduk tanpa disertai kontrol untuk mengatur jumlah pertumbuhan yang diinginkan hanya akan menimbulkan problema sosial ekonomi penduduk. Selain itu ditegaskan oleh Muta'ali (2015) yang menyatakan bahwa jumlah fasilitas pelayanan mengikuti keberadaan penduduk yang dilayani, sehingga semakin tinggi jumlah penduduk maka jumlah pelayanan semakin banyak.

Berdasarkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat bahwa jumlah ketersediaan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada tahun 2006 yang paling tinggi berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan total prasarana 217. Sedangkan tahun

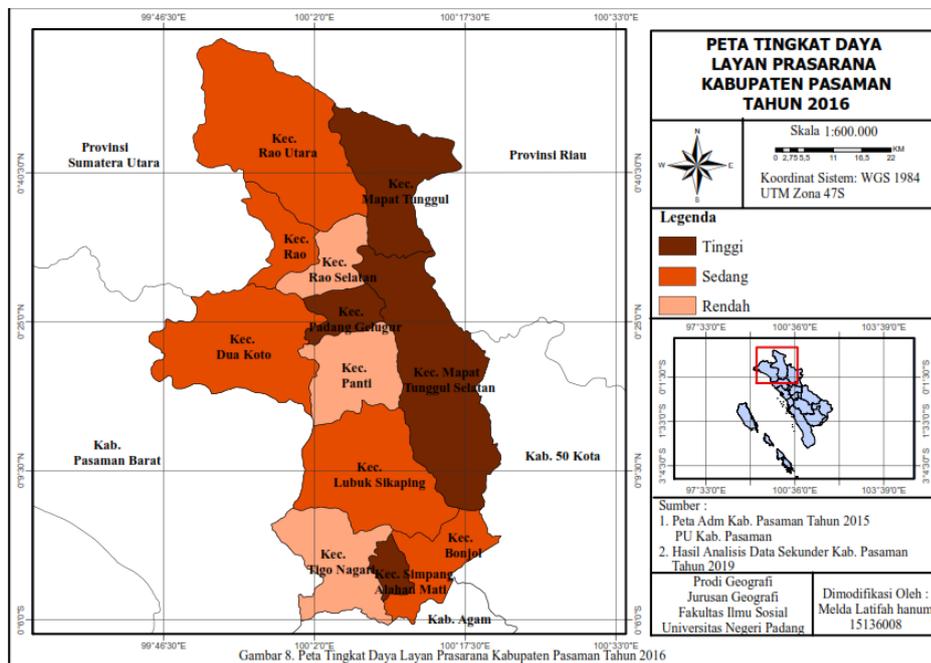
2016, ketersediaan prasarana di Kecamatan Lubuk Sikaping bertambah menjadi 231. Hal ini dikarenakan Kecamatan Lubuk Sikaping merupakan pusat kota/ibu kota Kabupaten Pasaman sehingga pada kecamatan ini pemerintah terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Adanya peningkatan jumlah prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk pada setiap wilayah. Jumlah penduduk tahun 2006 terbesar berada di Kecamatan Lubuk Sikaping yakni 43.858 jiwa kemudian bertambah menjadi 45.260 jiwa tahun 2016. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk relatif kecil tahun 2006 berada di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Tahun 2016, jumlah penduduk relatif kecil berada di Kecamatan Mapat Tunggul.

Berikut menunjukkan hasil peta tingkat daya layan prasaran Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016.



Gambar 4. Peta Tingkat Daya Layan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2006



Gambar 5. Peta Tingkat Daya Layan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2016

PENUTUP

KESIMPULAN

Pertama, Variasi keruangan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 yang termasuk

dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Dua Koto. Kedua, Variasi keruangan tingkat daya layan sarana dan prasarana di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016

mengalami perubahan. Tahun 2006, yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Padang Gelugur, dan Kecamatan Mapat Tunggul. Sedangkan tahun 2016 yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Mapat Tunggul, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2017. *Kabupaten Pasaman dalam Angka 2017*, Kabupaten Pasaman.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2007. *Kabupaten Pasaman dalam Angka 2007*, Kabupaten Pasaman.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2008. *Statistik Indonesia*.
- Evita Rahmawati, 2001. *Evaluasi Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi di Kabupaten Sragen Tahun 2000*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Geografi UMS.
- Junaedi, H. 1999. *Pembangunan di Pedesaan*. Jakarta: UI Press.
- Junianto, 2014. *Analisis Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomidi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi.
- Muta'ali, Luthfi. 2000. *Teknik Analisis Regional*. Jogyakarta: Jurusan PPW Fakultas Geografi UGM.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Standar Pelayanan Minimum (SPM) SNI03-1733-2004 *Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Sarana Pendidikan: Badan Standar Nasional Indonesia.